

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PRAPERADILAN  
TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( PUTUSAN  
NOMOR 04/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel)**

**Erikson Siregar**

**ABSTRAK**

Orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum berkewajiban atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap segala perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap semua orang karena setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu hak bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri apabila proses penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam kasus Komjen. Pol. Budi Gunawan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Apa yang menjadi dasar pengajuan praperadilan yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana? (2) Bagaimana penerapan pengajuan praperadilan dengan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Untuk itu penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melalui studi kepustakaan ataupun studi dokumen. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Komjen. Pol. Budi Gunawan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Pada kasus ini dapat di sarankan Perlunya aparat penegak hukum (pejabat penyidik dan penuntut umum) dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana memperhatikan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dan menjalankan tugas pemeriksaan penyidikan dan penuntutan secara proporsional.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Praperadilan

**JURIDICAL REVIEW DETERMINATION OF FILING  
PRETRIAL ALLEGED SUSPECT TO DO CORRUPTION  
(DECISION NUMBER 04 / PID . PRAP / 2015 / PN . JKT . SEL)**

**Erikson Siregar**

**ABSTRACT**

The orientation of law enforcement should be directed to achieve social objectives through legal and law enforcement agencies are authorized to enforce the law. Law enforcement agencies will be liable for the implementation of strict enforcement and consistently against all illegal acts in accordance with the legal provisions applicable to everyone because each person are equal before the law. As we know that the Criminal Procedure Code provide guarantees for the protection of rights of every citizen of Indonesia. The right one for someone who is named as a suspect or defendant is right to apply to the court if the pretrial investigation or prosecution process was not conducted in accordance with applicable law, as in the case Komjen. Pol. Budi Gunawan. In writing this essay that the problem is: (1) What is the basis of pretrial filings were named as a suspect committing a crime? (2) How does the application of pretrial filings by reason of a person named as a suspect? To the authors in the preparation of this research using normative juridical research method, the research done through the study of literature or studies document. This research method selected is a research method that aims to assist and facilitate in obtaining the necessary information to do with this paper. Determination of suspects conducted by KPK investigators to Komjen. Pol. Budi Gunawan was not conducted in accordance with the legal provisions in force, which affects the deprivation of rights of suspects or defendants. In this case can suggest Importance of law enforcement officers (the investigation authorities and the public prosecutor) in conducting the criminal case investigation notice rights of suspects or accused and run the investigation and prosecution of inspection tasks proportionately.

Keywords : Law Enforcement, Crime, Pretrial